

Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Fraud Guna Mendukung Terwujudnya GCG Pada Perumda Air Minum Mual Nauli Tapteng

The Effectiveness of Internal Control in Preventing Fraud to Support the Realization of GCG at Perumda Drinking Water Nauli Tapteng

Tigor Panuturi Tambunan*, Masril Tua Rambe, Deliana & Ilham Napitupulu

Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 06 Januari 2024; Direview: 31 Januari 2024; Disetujui: 22 Februari 2024

*Corresponding Email: tigortambunan011@gmail.com

Abstrak

Sistem pengendalian internal pada Perumda Mual Kabupaten Tapteng dilaksanakan untuk mengetahui apakah sistem manajemen sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak dan menghindari terjadinya kebocoran biaya. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan penerapan sistem pengendalian intern sebagai upaya pengendalian ataupun bahkan pencegahan kejadian tindakan kecurangan. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi (observation) dan wawancara (in depth interview). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perumda Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah berhasil melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Fraud, GCG

Abstract

The internal control system at Perumda Mual Tapteng Regency is implemented to find out whether the management system has been implemented well or not and to avoid cost leaks. What this research aims to achieve is to analyze the effectiveness of implementing an internal control system as an effort to control or even prevent incidents of fraud. Qualitative methods were applied in this research using data collection techniques carried out through observation and interviews (in depth interviews). The results of this research indicate that Perumda Mual Nauli, Central Tapanuli Regency has succeeded in implementing an effective internal control system.

Keywords: Internal Control System, Fraud, GCG

How to Cite: Tambunan, T.P. Rambe, M.T. Deliana & Napitupulu. I. (2024). Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Fraud Guna Mendukung Terwujudnya GCG Pada Perumda Air Minum Mual Nauli Tapteng. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1174-1181.

PENDAHULUAN

Pengendalian intern yang dipahami sebagai usaha manajemen dalam menjaga aktiva (kekayaan) organisasi melalui penerapan prosedur tertentu bekerja melalui tiga dimensi dalam menjaga aktiva perusahaan. Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara preventive, detektif dan korektif. Lemahnya sistem pengendalian intern dalam manajemen perusahaan terbukti telah banyak mengakibatkan perusahaan berguguran karena tindak kecurangan dan ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen maupun non manajemen (Theodore, 2015)

Organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang handal bagi para pemegang saham, investor, kreditor, dan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal dinilai penting karena banyak manajemen yang tidak selalu memenuhi tanggungjawab secara benar. Padahal, dengan Pengendalian internal yang baik oleh manajemen, maka suatu perusahaan akan memiliki daya tarik bagi mitranya karena dianggap manajemen memiliki tanggungjawab dan komitmen dalam mengelola perusahaan dengan baik dan benar (Mora et al., 2020; Syardiansah et al., 2020; Windy et al., 2023).

Disamping itu, Pengendalian Internal yang baik juga merupakan sebuah upaya untuk menjadikan perusahaan dapat lebih dipercaya dan going concern sebagai wujud implementasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Wahyudin et al., 2014). Tujuan dari tata kelola keuangan ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Adapun prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* ini meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran (*fairness*) (Wahyudin et al., 2014).

Dalam pengendalian suatu sistem manajemen, kecurangan (*Fraud*) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan (*Opportunity*) atau peluang. Salah satu penyebab dari banyaknya kecurangan yang terjadi dikarenakan masih rendahnya pengendalian internal serta kurang maksimalnya fungsi pengawasan. Pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum (Cendikia et al., 2016).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Mual Nauli merupakan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Perusahaan yang dulunya bernama PDAM Mual Nauli berdiri sejak tahun 1984 dan fungsinya adalah memberikan layanan publik kepada para pelanggan air minum dalam hal ini masyarakat. Dimana kehadiran perusahaan ini berkaitan erat dengan program nasional yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu dalam upaya memberikan penyediaan dan pelayanan air minum berkualitas, bersih dan sehat kepada masyarakat. Dimana air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia untuk minum maupun keperluan lainnya.

Dalam hal pelayanan, Perumda Mual Nauli Kab. Tapanuli Tengah (Tapteng) sejauh ini baru mampu melayani pasokan air minum kemasayarakat kurang lebih 20 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 374.734 jiwa atau 73.200 KK (hasil sensus BPS tahun 2022), dengan jumlah pelanggan aktifnya sampai bulan Nopember 2023 baru mencapai sekitar 7055 KK, menjangkau 12 Kecamatan dari total jumlah Kecamatan di Kab. Tapanuli Tengah sebanyak 20 Kecamatan, dengan jumlah cabang pelayanan ada sebanyak 4 (empat) cabang yang berlokasi di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapani Nauli dan Kecamatan Pinangsori.

Padahal berdasarkan penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Basuki Hadimuljono pada 'side event' SWA (*Sanitation and Water for All*), Portal



Indonesia,GO.ID (2023, April 9), Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan target SDG (Sustainable Development Goals) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dalam upaya mewujudkan 100 % akses air minum dan sanitasi di seluruh daerah. Dimana hingga tahun 2023, capaian cakupan layanan air minum hingga Maret 2023 telah mencapai 91,05 %.

Masih menurut Basuki, untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya percepatan. Misalnya, pembangunan prasarana penyedia air minum dengan memanfaatkan 61 bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air. Kemudian, Pembangunan prasarana penyedia air minum untuk mendukung kawasan prioritas nasional, seperti kawasan Pariwisata di Kalidendeng dan Labuhan Bajo, serta kawasan industri di Batang.

Dalam perkembangannya, Perumda Mual Nauli sejauh ini belum bisa bersaing dengan perusahaan sejenis seperti Perumda Tirtanadi dan Tirta Nauli Sibolga yang telah dapat melayani pasokan kebutuhan air minum bagi masyarakat Tapteng khususnya yang berada di kawasan perkotaan Pandan mencapai untuk 9900 pelanggan (KK). Sementara untuk pelanggan Perumda Mual Nauli sendiri baru melayani kebutuhan air minum masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pinggiran kota maupun desa-desa pada 12 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sejauh ini, pasokan sumber bahan baku yang dikelola oleh Perumda Tirtanadi dan Perumda Tirta Nauli juga berasal dari Kab. Tapanuli Tengah. Dimana untuk diketahui Kab. Tapanuli Tengah sejauh ini memiliki sumber bahan baku yang memadai dan unggul karena lokasi sumbernya berada di elevasi 180 meter dari lokasi pelayanan, dan estimasinya bisa untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga 50 tahun ke depan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan agar terdorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen (Octaviani, 2018).

Sistem pengendalian intern berfungsi untuk pengaturan sumber daya yang tersedia sehingga berfungsi secara maksimal untuk memperoleh selisih dari keuntungan dengan dengan berpedoman pada asas cost dan benefit. Tujuan penerapan sistem pengendalian intern dalam perusahaan adalah menghindari penyimpangan kegiatan atau kebijakan dari prosedur yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan dan fungsi sistem informasi akuntansi yang dihasilkan lebih terpercaya serta kegiatan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kinerja suatu perusahaan terutama manajemen mampu menghindari resiko penerapan suatu system (Hossain, Jewel, et al., 2012; Hossain, Rahman, et al., 2012).

Tujuan Sistem Pengendalian Internal diantaranya merupakan menjaga kekayaan dan catatan organisasi, melakukan pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dengan menggunakan sumber daya dan sarana. Dan juga bertujuan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Humam & Ardini, 2023).

Kecurangan atau *fraud* merupakan representasi yang salah atau penyembunyian fakta yang material untuk memengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga.

Dilansir dari situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi. Pelanggaran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, biasanya terdiri dari tiga kondisi, yang sering disebut *fraud triangle*. Dalam buku *Other People's Money: a Study in the Social Psychology of Embezzlement (1953)* oleh D Cressey, *fraud triangle* adalah gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan.

GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menurut Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Giavinny & Ugut, 2022; Kaban et al., 2017; Rudi Hartono, 2016).

GCG dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip GCG, yaitu; Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. Praktik Tata Kelola Perusahaan konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Haidar Human, Lilis Ardin dan Kurnia., 2020	Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor	Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kecurangan	Sistem Pengendalian Internal Intern yang dilakukan di PDAM Kabupaten Bogor dalam hal pemisahan tugas dan wewenang masih belum berjalan maksimal dengan bukti adanya rangkap jabatan. Hal tersebut dikhawatirkan akan adanya penyalagunaan wewenang jabatan yang berakibat pada kecurangan.
2	Dwi Handoyo Miharjo, 2018	“Optimalisasi Peran Auditor Internal Dalam Penerapan Sistem Anti Fraud “(Studi kasus Bank Sleman)	-	Potensi kecurangan menjadi sebuah polemik pada perusahaan khususnya di dunia perbankan. Penerapan anti fraud sudah berjalan baik dengan mendeteksi risiko yang ada pada setiap unit kerja. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan guna memberikan pemahaman terhadap fraud pada setiap karyawan.
3	Ardi Irphani, 2017	Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis dan Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro).	Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	penelitian ini berfokus pada pengaruh tekanan, perilaku tidak etis dan jabatan dalam mengantisipasi terjadinya fraud.

METODE PENELITIAN

Adapun bentuk metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yakni metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada, dan selanjutnya melakukan analisis secara utuh dan mendalam terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini.

Metode penelitian deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi



substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam dan selanjutnya dapat dianalisis sebagai *'problem solving'*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Muasal Terjadinya Kecurangan

Kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar (Widjaja, 2012). Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau menghindari pajak serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha (Sayyid, 2015).

Dalam teori segitiga fraud, sebuah kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok di dalam sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai dasar sebuah dorongan yang pada akhirnya kecurangan tersebut dilakukan. (Kurniawan, 2014), menjelaskan banyak hal tentang dorongandorongan umum terjadinya fraud triangle theory, yaitu:

Tekanan (*pressure*), adalah segala sesuatu yang dihadapi oleh pelaku kecurangan dan menciptakan kebutuhan mendesak baginya untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan mendesak yang dihadapi ini biasanya berkaitan dengan tekanan keuangan berupa hutang dan gaya hidup yang boros namun tidak disertai dengan kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai gaya hidup tersebut. Selain itu, kebiasaan buruk lain seperti mengkonsumsi narkoba dan berjudi juga turut memberikan tekanan bagi seseorang untuk mencari uang melalui tindakan kecurangan.

Kesempatan (*oppurtunity*), sangat berkaitan dengan situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan ini timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Orang-orang yang telah bekerja lama di dalam sebuah organisasi tentu lebih memahami kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pengendalian internal sehingga dapat melakukan kecurangan tanpa dideteksi oleh pengendalian internal.

Kesempatan juga dapat dimiliki apabila orang lain terlalu percaya kepada pelaku kecurangan tanpa memberikan pengawasan yang memadai dengan alasan telah menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi yang diberikan. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindakan kecurangan.

Pembenaran (*rationalization*), adalah pola pikir para pelaku kecurangan yang menjadi alasannya untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya. Beberapa alasan yang digunakan oleh banyak pelaku kecurangan untuk mencari pembenaran atas perbuatannya, antara lain; alasan yang pertama adalah pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa dan sering dilakukan oleh orang lain. Alasan kedua yaitu pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima kompensasi yang telah diterimanya saat ini. Alasan berikutnya adalah pelaku menganggap bahwa ia hanya meminjam dari organisasi dan suatu saat akan dikembalikan. Alasan yang terakhir yaitu pelaku beranggapan bahwa perbuatannya ini tidak melukai siapapun dan hal tersebut hanya merupakan masalah yang kecil saja.

Sistem Pengendalian Terhadap Kecurangan

Semakin banyak informasi tentang kasus kecurangan yang melibatkan banyak pihak di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut menggambarkan betapa tindak kecurangan sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Salah satu penyebab terjadinya tersebut adalah lemahnya sistem pengendalian internal dari suatu organisasi. Dalam suatu manajemen, evaluasi dan pengendalian adalah komponen penting untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi agar terlaksana dengan baik. Evaluasi dan pengendalian dapat dilaksanakan sendiri oleh manajemen yang disebut pengendalian internal.



Dalam PP No.60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan Sistem Kendali Kecurangan telah dilakukan sejak tahun 2012. Istilah ini diadaptasi dari sistem yang telah berjalan di negara-negara lain yang biasanya menggunakan istilah Fraud Control Plan, Australian National Audit Office Fraud Control Strategies, dan lain-lain.

GCG, Tantangan & Pertumbuhan Perusahaan

Untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan di setiap aktivitas bisnisnya, diperlukan adanya komitmen bersama oleh seluruh karyawan/staf maupun oleh para pemangku kepentingan, sebab komitmen merupakan penggerak utama pertumbuhan suatu Perusahaan. Komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai Perusahaan di setiap aktivitas bisnisnya, menjadi penggerak utama pertumbuhan suatu perusahaan yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dan terus melaksanakan program peningkatan mutu produk atau layanan secara berkesinambungan dengan menerapkan strategi Perusahaan yang tepat.

Kombinasi antara nilai-nilai Perusahaan, konsistensi penerapan program peningkatan kualitas produk atau layanan, dan semangat untuk melakukan continuous improvement, serta penerapan GCG di seluruh lingkup perusahaan, akan menjadi pondasi yang kokoh bagi Perusahaan untuk bertahan menghadapi segala tantangan yang ada. Untuk dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability growth*), dibutuhkan faktor-faktor pendukung di internal dan strategi yang tepat dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi di lingkup eksternal termasuk dalam hal ini peranan GCG dalam pengelolaan perusahaan dalam aktivitas kesehariannya.

GCG, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Untuk mewujudkan GCG secara konsisten, diperlukan sikap integritas dari seluruh karyawan dan Perusahaan. Integritas terwujud bila adanya Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang disusun berlandaskan nilai-nilai perusahaan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Perusahaan. Pedoman Perilaku dan Etika Usaha ada agar tersedianya petunjuk praktis bagi Perusahaan dan seluruh insannya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip GCG, tersedianya panduan untuk mewujudkan nilai-nilai Perusahaan, dan tersedianya acuan bagi insan perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja.

Pedoman Perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan GCG berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai oleh seluruh karyawan Perusahaan sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Keadilan). Mengingat lingkungan bisnis yang sangat dinamis, maka perlu dikaji Pedoman Perilaku secara berkesinambungan dalam rangka mendapatkan standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan.

Etika Usaha merupakan standar perilaku yang diharapkan dari Perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, pemegang saham, media, pesaing, dan masyarakat sekitar. Untuk menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan sebagai sebuah Perusahaan yang kompetitif, Perusahaan seyogyanya bertanggung jawab untuk; menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang etis dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkomitmen penuh terhadap standar etika dan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku, memahami dan mendukung pengembangan masyarakat setempat dengan menerapkan prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengembangkan, dan mendukung pelestarian lingkungan di wilayah operasi Perusahaan.

SIMPULAN



Sistem pengendalian internal secara keseluruhan di Perumda Mual Nauli Kabupaten Tapteng sudah terlaksana dengan efektif. Komunikasi yang terjalin sudah sangat baik dengan memanfaatkan era digital, dimana smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi melainkan juga digunakan sebagai alat tukar informasi yang cepat, efektif dan efisien tanpa harus menyampaikan secara tatap muka langsung.

Semakin baik sistem pengendalian internal dengan implementasinya maka akan semakin baik pula terhadap kualitas laporan buku kinerja Perumda Mual Nauli Kabupaten Tapteng. Semakin tinggi akuntabilitas yang ada dalam setiap personil pegawai Perumda Mual Nauli Kabupaten Tapteng, akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan.

Saran

Untuk mencegah terjadinya tindakan fraud, sebaiknya perusahaan lebih mengefektifkan pengawasan dari dalam perusahaan dan melakukan pelatihan pencegahan kecurangan kepada seluruh karyawan agar semua karyawan dapat mengetahui bahaya dari tindakan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan di masa yang akan datang akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendikia, C., Syahza, A., & Trisnawati, F. (2016). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pdam Tirta Siak Pekanbaru. Riau University.
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Hossain, M. Y., Jewel, M. A. S., Nahar, L., Mosaddequr Rahman, M., Naif, A., & Ohtomi, J. (2012). Gonadosomatic index-based size at first sexual maturity of the catfish *Eutropiichthys vacha* (Hamilton, 1822) in the Ganges River (NW Bangladesh). *Journal of Applied Ichthyology*, 28(4), 601–605.
- Hossain, M. Y., Rahman, M. M., Fulanda, B., Jewel, M. A. S., Ahamed, F., & Ohtomi, J. (2012). Length–weight and length–length relationships of five threatened fish species from the Jamuna (Brahmaputra River tributary) River, northern Bangladesh. *Journal of Applied Ichthyology*, 28(2), 275–277.
- Humam, H., & Ardini, L. (2023). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *Equity*, 23(2), 151–166.
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan Analysis of Principles of Corporate Governance Good Corporate Governance dan Good Corporate Governance merupakan Good Corporate Governance sendiri buk. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 1–16.
- Kurniawan, A. (2014). *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Mora, Z., Fandayani, I., & Suharyanto, A. (2020). Pengaruh Komitmen Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Mopoli Raya di Kecamatan Seruway. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 487–492. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.348>
- Rudi Hartono. (2016). PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR:PER-01/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV). *Jurnal Mercatoria*, 9(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- Syardiansah, S., Latief, A., Daud, M. N., Windi, W., & Suharyanto, A. (2020). The Effect of Job Satisfaction and Organizational Culture on Employee Performance of the Royal Hotel in East Aceh District. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 849–857.
- Theodore, J. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Audit Fee (KAP di Bandung). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Universitas Kristen Maranatha, Bandung*.
- Wahyudin, A., Cahyaningdyah, D., & Baroroh, N. (2014). Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai upaya meminimalisir praktek tidak sehat dalam tata kelola keuangan koperasi. *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi Dan Pembelajaran*, 12(2), 132–140.
- Widjaja, A. (2012). *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Jakarta: Harvarindo.

Windy, D., Manik, A., Suharyanto, A., & Lubis, Y. A. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Performance Analysis of State Civil Servants in the General Section of the Regional Secretariat o. 5(1), 46–53.

